

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

IUU fishing menjadi masalah banyak negara terutama mereka yang memiliki wilayah lautan, tak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di laut Indonesia semakin mengkhawatirkan, berdasarkan data yang dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 300 triliun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia.¹ Sehingga jika dana sebesar 300 triliun tersebut dikalikan, maka kerugian negara selama sepuluh tahun terakhir mencapai 3000 triliun.

Dampak negatif *IUU fishing* juga merupakan tindakan yang merugikan negara secara finansial. Hal ini terlihat dari penyalahgunaan subsidi BBM. Dalam peraturan Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kapal-kapal diatas dan dibawah 30 Gross Ton (GT) bisa mendapatkan BBM bersubsidi.² Namun hal ini mendatangkan masalah baru, seperti dalam pernyataan menteri kelautan perikanan Susi Pudjiastuti bahwa

¹ Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hlm.172, diakses dari www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/11_aqi_illegal_unreported_and_unregulated.pdf, pada (01/05/2015, 05:23 WIB).

² KIARA: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, “Pemerintah Kebablasan, Kapal Seharga RP 2 Miliar Boleh Tenggang BBM Bersubsidi”, diakses melalui <https://www.kiara.or.id/pemerintah-kebablasan-kapal-seharga-rp2-miliar-boleh-tenggang-bbm-bersubsidi/> pada (21/03/2017, 12:13 WIB)

pemerintah tidak akan memberikan lagi BBM bersubsidi kepada kapal-kapal di atas 30 GT, dikarenakan sering mendapat laporan mengenai penyimpangan kapal-kapal besar terhadap BBM bersubsidi yang diselundupkan di tengah laut dan dijual kepada kapal-kapal asing yang sedang asik mencuri ikan di lautan Indonesia kemudian di selundupkan dan dijual kembali kepada kapal-kapal industri,³ dan yang lebih parahnya lagi subsidi BBM yang diberikan pemerintah untuk nelayan di jual kembali ke industri-industri dengan harga yang lebih mahal, hal ini kemudian membuat banyak nelayan yang tidak pergi melaut untuk menangkap ikan, akibatnya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 1 T per hari nya.⁴

Besarnya potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh praktek IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia membuat pemerintah terus berupaya memberantasnya. Baik melalui patroli rutin kapal perang di laut Indonesia, upaya memperkuat aturan izin penangkapan ikan terutama oleh nelayan asing maupun upaya melakukan kerjasama internasional dengan berbagai negara seperti kerjasama Indonesia dan Australia dalam menanggulangi IUU *fishing* dan organisasi internasional, yaitu kerjasama dengan *Food and Agricultural Organization* (FAO).

Food and Agriculture Organization (FAO) merupakan salah satu badan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdiri pada bulan Oktober 1945 di Quebec, Kanada dan berkantor pusat di Roma. Tujuan utama dari didirikannya

³ Elisa Valenta, "Susi Pudjiastuti: Subsidi BBM Kapal Besar untuk Kapal Nelayan" diakses pada <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150127135129-92-27674/susi-pudjiastuti-subsidi-bbm-kapal-besar-untuk-kapal-nelayan/> pada (29/11/ 2016, 13:00 WIB)

⁴ Ahmad Wijaya, "Subsidi BBM Banyak disalahgunakan" diakses melalui pada <http://www.antaranews.com/berita/462426/subsidi-bbm-banyak-disalahgunakan> pada (29/11/2016, 13:10 WIB)

organisasi dunia ini adalah untuk menjamin setiap orang dapat memperoleh kebutuhan akan pangan, sehingga FAO menjamin mampu dalam mengurangi angka kekurangan gizi, meningkatkan hasil pertanian, memperbaiki kehidupan masyarakat di desa-desa, membantu kelancaran pertumbuhan ekonomi internasional serta melakukan pemeliharaan dan perlindungan, perbaikan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti lahan, air, hutan, perikanan dan sumber daya genetik yang bersifat berkelanjutan demi keperluan dan pertanian, dengan memberikan bantuan berupa bantuan pembangunan dan bantuan teknis ke negara-negara yang membutuhkan.⁵

Indonesia secara resmi bergabung menjadi anggota FAO, pada tanggal 28 November 1949 dan Kantor Perwakilan FAO di Jakarta dibuka sejak tahun 1979. FAO juga mempercayakan kepada Indonesia untuk memimpin berbagai kepanitiaan dalam kelompok kerja penting, termasuk posisi sebagai *Independent Chair*⁶ dari dewan FAO, komite masalah-masalah komoditi, serta komite konstitusi dan masalah hukum, Sidang *Committee on Fisheries* (COFI) dan sidang *Asia Pasific Fisheries Commossion* (APFIC).⁷

Kerjasama Indonesia-FAO terus mengalami peningkatan terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dimana pada tanggal 26, 27 dan 28 Mei 2013, Jose Graziano da Silva, yang menjabat sebagai Dirjend FAO resmi berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Tujuan kedatangannya adalah untuk membahas

⁵Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Pusat Analisa Kerjasama Internasional dan Antar lembaga, *Food and Agricultural Organization*, diakses dari <http://103.7.52.8/index.php/kerjasama/kerjasama-multilateral/pbb/item/54-fao>, pada (21/01/2016, 10:35 WIB)

⁶ *Independent Chair* adalah Posisi yang tidak memiliki tekanan dari pihak mana pun

⁷*Ibid.*

potensi peningkatan kerjasama antara Indonesia dan FAO dengan fokus pada bidang pertanian, perikanan dan pembangunan daerah pedesaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dan FAO juga melakukan MoU tentang Kolaborasi Kelautan dan Perikanan yang meliputi beberapa poin utama diantaranya yaitu⁸ pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas yang termasuk juga mengenai pengembangan pendidikan, pelatihan bagi masyarakat nelayan, kemudian riset dan pertukaran para ahli, ilmuwan di bidang kelautan dan perikanan dan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*). Tujuan dari MoU tersebut sebenarnya untuk mengantisipasi eksploitasi ikan berlebihan, agar hasil tangkapan tersebut sekiranya mampu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Kerjasama Indonesia dengan FAO juga diperluas ke sektor pengelolaan sumber daya alam kelautan. Adapun proyek kerjasama yang dilakukan FAO di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir bernilai lebih dari 200 juta US\$.⁹ Kerjasama Indonesia-FAO melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya berupa berbagai macam proyek yang langsung diterapkan ke dalam hal teknis saja, namun juga berbagai kegiatan yang mengarah pada pengembangan kapasitas, kursus singkat dan pertukaran informasi di bidang kelautan dan

⁸ *Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kolaborasi Kelautan dan Perikanan*, diakses melalui http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/3441_OI-2013-0237.pdf, pada (30/05/2016, 05:29 WIB)

⁹ *Ibid.*

perikanan.¹⁰ Dari fakta di atas penulis tertarik untuk meneliti kepentingan Indonesia dalam kerjasama dengan FAO tahun 2013 – 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Bagaimana Kepentingan Indonesia dalam kerjasama bidang kelautan dan perikanan dengan FAO dalam kerjasama menanggulangi Illegal Fishing?*

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik-praktik illegal fishing di Indonesia
2. Untuk mengetahui latar belakang dan bentuk kerjasama Indonesia dan FAO dibidang kelautan dan perikanan.
3. Untuk mengetahui kepentingan Indonesia dalam kerjasama dengan FAO
4. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan dan peran FAO dalam kerjasama sekuritisasi sector perikanan dan kelautan.

¹⁰ KKP-FAO Perluas Kerjasama Sektor Perikanan, Harian Neraca Ekonomi, edisi (Selasa, 28/05/2013), diakses dalam <http://www.neraca.co.id/article/28949/kkp-fao-perluas-kerjasama-sektor-perikanan-libatkan-semua-eselon-i> pada (03/09/2013 0:33 WIB)

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Dengan adanya penulisan ini, semoga mampu memberikan sebuah informasi kepada pembaca dan menambahkan ilmu pengetahuan yang baru dalam Ilmu Hubungan Internasional mengenai kelautan dan Perikanan Indonesia. Penelitian ini bukan hanya sekedar informasi tentang bagaimana cara Indonesia bekerjasama dengan organisasi internasional untuk menjalankan kepentingan nasional Indonesia namun, sebagai media penyampaian kepada para pembaca, khususnya para akademisi agar lebih memanfaatkan, mengelola dan melindungi sumber daya alam Indonesia dengan sebaik-baiknya, khususnya dibidang kelautan dan perikanan dan menjadi sebuah semangat untuk seluruh pembaca bahwa Indonesia mampu menjadi negara kepulauan yang sangat maju, hal ini dapat terjadi jika seluruh masyarakat memiliki kesadaran akan potensi yang dimiliki Indonesia dan masyarakat memiliki kemauan untuk maju.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka akan menambah wawasan pembaca dengan temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk dapat dilakukannya penelitian-penelitian lanjutan yang sejenis.

1.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas arahnya,

apakah melanjutkan, menolak, atau mengambil aspek bagian lain dari penelitian sebelumnya.

Penelitian yang Pertama dilakukan oleh Anastasia Telesetky yang meneliti mengenai *Bilateral Negotiations to Co-Manage Shared Marine Fisheries For Purposes Of Conservation an Restoration*¹¹. Dalam penelitiannya, Anastasia menjelaskan bahwa kerjasama bilateral dalam bidang kelautan dan perikanan lebih efektif dilakukan dibandingkan kerjasama multilateral. Menurut Anastasia perjanjian bilateral sendiri mampu mengurangi isu-isu yang terjadi di negara yang satu dengan negara yang lain, lebih fokus, bersahabat dan memunculkan ide-ide yang cemerlang untuk menyelamatkan dan memulihkan ekosistem laut. Dimana diketahui bahwa eksploitasi ekosistem laut yang semakin memburuk dikarenakan penangkapan ikan secara berlebihan dan tidak memikirkan kelangsungan populasi makhluk yang ada di laut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Anastasia Talesetky adalah sama-sama membahas isu mengenai permasalahan yang terjadi di lautan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah Anastasia terfokus membandingkan cara penyelesaian dari permasalahan dengan cara kerjasama bilateral sebagai suatu cara yang efektif dalam penyelesaian yang ada di lautan dari pada menggunakan cara kerjasama multilateral, karena kerjasama bilateral dianggap lebih mengikat diantara kedua negara.

Penelitian yang kedua milik Nadya Eka Putri dengan penelitiannya yang berjudul *Kebijakan RI Melakukan Kerjasama Sumber Daya Kelautan*

¹¹Anastasia Telesetky Bilateral, "Negotiations to Co-Manage Shared Marine Fisheries For Purposes Of Conservation an Restoration", diakses melalui <http://digital.lib.uidaho.edu/cdm/ref/collection/lawir/id/14> pada (16 Oktober 2014, 02.03 WIB)

Perikanan Dengan Thailand.¹² Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menyadari bahwa kekayaan yang ada di lautan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan hal itu yang akan membuat kemajuan bangsanya. Pada tanggal 13 Desember 1957 Deklarasi Djuanda pun di umumkan, yang isinya menyatakan bahwa seluruh area perairan yang ada disekitar pulau-pulau atau pun bagian pulau-pulau dan yang termasuk bagian dari daratan Negara Republik Indonesia adalah wilayah yang tidak dapat diambil ahli oleh negara lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, maka dari itu Indonesia melakukan kerjasama untuk memperkuat Sumber daya kelautannya di bidang perikanan dengan Thailand, upaya yang dilakukan oleh kedua negara tersebut untuk membrantas ilegal *fishing*.

Hubungan Bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Thailand ini tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi untuk keduanya. Dalam kerjasama Indonesia dengan Thailand, keduanya lebih fokus di bidang hukum dan keamanan di wilayah perairan. Kerjasama ini dilakukan karena ilegal *fishing* yang semakin merajalela di wilayah perairan yang kaya akan hasil lautnya, kerjasama ini dilakukan atas dasar dibatasinya penangkapan ikan di Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2013.

Upaya-Upaya yang dilakukan Indonesia – Thailand sendiri untuk membrantas ilegal *fishing* yaitu penentuan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kerjasama Indonesia – Thailand di bidang perikanan, penguatan armada

¹²Nadya Eka Putri, “Kebijakan RI Melakukan Kerjasama Sumber Daya Kelautan Perikanan Dengan Thailand”, di akses melalui <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/3299/3196> pada (13 October 2014, 9.49 WIB)

perikanan nasional, penegakan hukum dan pengawasan penangkapan, penataan penggunaan kapal perikanan di ZEEL, penanganan tindakan pidana perikanan di Indonesia, penerapan sistem *Monitoring, Controlling, Surveillance* (MCS) dan pembentukan peradilan khusus perikanan. Walaupun upaya tersebut sudah dilakukan, pada kenyataannya kegiatan ilegal tersebut tetap saja terjadi. Indonesia mengetahui bahwa hasil kelautan Thailand tidak sebanyak Indonesia, hanya saja sistem dan teknologi dalam pengelolaan perikanan yang dimiliki oleh Thailand sangat jauh lebih lengkap dan baik ketimbang Indonesia.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengangkat isu mengenai perikanan dan kepentingan suatu negara. Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada konsep penelitian, dimana penemitan yang dilakukan oleh Nadya menggunakan hukum internasional. Dalam kerjasamanya, kedua negara membahas mengenai hukum dan keamanan wilayah perairan Indonesia dan Thailand yang berjudul kebijakan RI melakukan kerjasama sumber daya kelautan perikanan dengan Thailand.

Penelitian ketiga ditulis oleh Danita Pravinska dengan judul ***ASEAN Maritime Forume dalam Keamanan Maritim di Kawasan Asian Tenggara.***¹³ Danita menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh ASEAN adalah pembajakan dan perompakan atau lebih sering kita disebut dengan bajak laut. Kegiatan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di kawasan Asia Tenggara saja,

¹³ Danita Pravita, "ASEAN Maritime Forume dalam Keamanan Maritim di Kawasan Asian Tenggara", diakses melalui https://www.academia.edu/3676604/ASEAN_Maritime_Forum_dalam_Keamanan_Maritim_di_Kawasan_Asia_Tenggara pada (28 Novemeber 2014, 09:54 WIB)

tetapi terjadi di seluruh dunia dan kejadian ini tidak terjadi baru-baru ini tetapi sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu.

Para bajak laut ini lebih senang mengincar kapal-kapal kecil yang angkutannya berisi barang-barang yang mudah diperdagangkan secara ilegal. Dalam penelitian ini, pelaku dari pembajakan tersebut adalah para nelayan-nelayan miskin. Tindakan yang mereka lakukan tidak hanya mengambil alih kapal-kapal atau mengambil barang-barang saja, tetapi juga menyandera para awak yang ada di kapal itu juga untuk diminta tebusan berupa uang. Tindakan yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya pembunuhan tahun 2002 yang terjadi di perairan Asia Tenggara.

Negara-negara kawasan Asia Tenggara merupakan negara yang rawan akan pembajakan, hal ini dikarenakan kawasan perairan ASEAN khususnya Asia Tenggara merupakan perairan yang dilewati kapal-kapal diseluruh dunia. Selain itu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi dikarenakan keadaan ekonomi negara tersebut yang membuat kawasan perairan Asia Tenggara menjadi sarangnya bagi bajak laut.

Akibat dari ancaman keamanan tersebut, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara akhirnya memperkuat pertahanan mereka dengan cara membelanja kebutuhan militer, contohnya saja seperti negara Vietnam yang mendapatkan jet tempur dan kapal selam dari Rusia, Indonesia membeli kapal selam dari Korea Selatan dan sistem radar wilayah pesisir dari Cina dan AS, dan tidak terkecuali negara-negara lainnya yang menambah persenjataannya.

Menurut Danita dengan adanya kegiatan pemberlanjaan militer negara yang semakin bertambah, menjadi sebuah kekhawatiran dimasa yang akan datang, karena bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan terjadi sebuah pertempuran. Perekonomian di negara-negara ASEAN khususnya negara Asia Tenggara semakin meningkat dan kebutuhan dalam meningkatkan keamanan nasional juga semakin bertambah. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan yang menyangkut masalah kelautanda dan perikanan. Perbedaan pada penelitian ini ialah metode penelitian yang dipakai adalah keamanan Internasional untuk menyelesaikan permasalahan kemanan laut dari serangan para pembajak di perairan negara-negara ASEAN.

Penelitian yang keempat adalah penelitian milik Dewi Indira Biasane, dengan penelitiannya yang berjudul ***Kerjasama Maritim Asia Tenggara Dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)***.¹⁴ Penelitian ini berisi permasalahan mengenai penangkpan ikan secara ilegal yang ada di Indonesia. Akibat adanya permasalahan ini, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 30 triliun setiap tahunnya.

Namun, tidak hanya Indonesia yang mengalami kerugian tetapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga ikut merasakan imbasnya dari kegiatan ilegal tersebut. Kegiatan *illegal fishing* ini terjadi dikarenakan bertambahnya permintaan para konsumen dan harga jual yang tinggimembuat para pelaku

¹⁴ Dewi Indira Biasane, "Kerjasama Maritim Asia Tenggara Dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)", diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126508-T%2026250-Kerjasama%20maritim-Pendahuluan.pdf> pada (5 Desember 2014, 14:10 WIB)

penangkapan ikan mengambil ikan secara berlebihan hingga praktek *illegal fishing*. Hingga kerugian seperti kelangkaan pada ikan-ikan jenis tertentu, rusaknya ekosistem laut, pencemaran lingkungan, membayar upah para anak buah kapal dibawah standar, tidak adanya pemasukan negara, Karena setiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya yang berbeda maka dari itu diperlukan kerjasama.

Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 di Bali terbentuk *Regional Ministerial Meeting (RMM) Promoting Responsible Fishing Practices in the Region*. Pertemuan tersebut menghasilkan *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA-IUU)*. Kerjasama tersebut digunakan untuk pertukaran informasi, manajemen dan berbagi atau bertukar keahlian dan teknologi serta melakukan kontrol dan pengawasan kepada seluruh peserta.

Walaupun begitu pada masa RPOA tidak ada pengamanan yang kuat dalam mengamankan perairan wilayah negara-negara Asia Tenggara. Contohnya adalah ketika para pelaku kegiatan ilegal *fishing* ini tertangkap, penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan cara hukum laut internasional dan hukum nasional negara pantai. Penyebab dari belum kuatnya RPOA dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh kawasan Asia Tenggara yaitu batas-batas wilayah kemaritiman dan beberapa negara RPOA belum meratifikasi bagaimana mengatur perilaku negara-negara dalam konteks hukum laut internasional, dan juga hingga saat ini Thailand anggota RPOA masih belum meratifikasi UNCLOS.

Pada penelitian milik Dewi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengikat masalah kelautan dan perikanan. Hanya saja metode penelitian yang dipakai adalah kerjasama Multilateral, Neo-Liberal dan Teori Fungsionalis untuk membahas kerjasama maritime di Asia Tenggara untuk mengurangi permasalahan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Republic Indonesia (WPPRI). Namun, menurut Anastasia kerjasama Multilateral tidak cocok jika dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dilautan karena dianggap tidak kuat dan tidak mengikat.

Penelitian yang kelima adalah milik Tya Gita Herdiana dengan penelitiannya yang berjudul ***Kerjasama Indonesia – Australia dalam Penanggulangan Illegal Fishing***.¹⁵ Dalam Penelitiannya Gita, ia mengatakan bahwa Indonesia dan Australia memiliki potensi dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi berkat hasil perikanan dan bioteknologi kelautan, seperti yang dimiliki potensi Indonesia yaitu mencapai 82 miliar dolar AS/ tahunnya. Sedangkan Australia di Negara bagian Queensland dengan panjang garis pantai 2.100 km, melalui potensi pariwisata baharinya mencapai 2 miliar dollar AS. Dengan potensi sebesar itu kedua Negara tersebut harus mengamankan potensi yang mereka miliki dari ancaman para nelayan illegal

Kepentingan Indonesia dalam penanganan *illegal fishing* yaitu mengenai masalah finansial, kelembagaan yang belum mengarah pada subsistem dan masalah teknologi. Dengan Indonesia bekerjasama dengan Australia maka

¹⁵ Tya Gita Herdiana, “ *Kerjasama Indonesia – Australia dalam Penanggulangan Illegal Fishing*”, melalui perpustakaan Lab Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, pada (28 November 2014, 12:14 WIB)

Indonesia mampu menangani permasalahan tersebut dengan lebih baik, karena Indonesia menganggap teknologi yang dimiliki oleh Australia lebih canggih. Sedangkan Kepentingan Australia sendiri yaitu untuk mencegah para nelayan ilegal masuk ke dalam perairan Australia untuk mengambil ikan dan biota laut lainnya.

Karena kedua Negara tersebut memiliki masalah yang sama akibat illegal Fishing, maka Indonesia dan Australia melakukan kerjasama untuk penanganan illegal fishing melalui sebuah kesepakatan yang dilakukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 November 2006. Kedua Negara tersebut sepakat untuk menjalin kerjasama keamanan yang disebut dengan "*Perjanjian Lombok*", yang mana kerjasama tersebut membahas tentang kerjasama maritim.

Berdasarkan temuan dari Tya Gita, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam Perjanjian Lombok ini sangat berbeda dari perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara sebelumnya yaitu perjanjian Lombok ini berguna dalam menyelesaikan ketegangan antara kedua negara. Dalam perjanjian ini Australia menggunakan kesepakatan ini untuk mempertahankan keamanan nasional Australia dari ancaman *illegal fishing* yang dapat mengancam kepentingan nasionalnya, sedangkan Indonesia menggunakan kerjasama ini untuk mengatasi *illegal fishing* dan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dengan pemerintah, yang berniat untuk memisahkan diri.

Dengan dilakukannya kerjasama antara kedua negara tersebut, Indonesia memberikan dua syarat kepada Australia yang berisikan bahwa politik Australia tidak boleh mendukung gerakan para kelompok separatis di wilayah Indonesia

dan Australia juga tidak diperbolehkan menjadi pangkalan atau tempat utama bagi kelompok yang menyetujui untuk kemerdekaan Papua. Dengan adanya pernyataan tersebut maka Perjanjian Lombok menjadi jalan keluar untuk penanganan kasus *illegal fishing*

Perbedaan skripsi ini sangat terlihat mulai dari Indonesia menyelesaikan permasalahan *illegal fishing*nya dengan melakukan kerjasama bilateral dengan Australia, pembahasan yang dibahas pun mengenai bagaimana cara menyelesaikan *illegal fishing* melalui perjanjian Lombok dengan dua syarat yang sudah di buat oleh Indonesia. Sedangkan persamaan dari skripsi ini terdapat di pembahasan yang membahas mengenai *illegal fishing* pada sub pembahasan yang saya miliki.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Nama dan Judul	Teori/ Konsep dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bilateral Negotiations to Co-Manage Shared Marine Fisheries For Purposes Of Conservation an Restoration Anastasia Telesetky	Kerjasama Multilateral, Perjanjian Bilateral	Dalam mengatasi permasalahan ekosistem laut yang terjadi di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) ini, perjanjian Multilateral kurang mampu mengatasi masalah ekosistem yang ada di ZEE, namun perjanjian Bilateral lebih memungkinkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dampak dari perjanjian bilateral sendiri mampu mengurangi isu-isu yang terjadi di negara yang satu dengan negara yang lain, lebih fokus, bersahabat dan memunculkan ide-ide yang cemerlang untuk menyelamatkan dan memulihkan ekosistem laut.
2	Kebijakan RI Melakukan	Hukum Internasional,	Hasil dari kerjasama kedua negara tersebut membuat Indonesia dan Thailand saling menguntungkan, yang

	Kerjasama Sumber Daya Kelautan Perikanan Dengan Thailand Nadya Eka Putri	Metode Deskriptif	mana Indonesia memiliki pengetahuan dan teknologi yang kurang mampu memanfaatkan sumber daya lautnya sedangkan Thailand memanfaatkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya perikannya, kerjasama ini dilakukan agar kedua negara ini mampu memasuki dan bersaing di pasar perikanan Uni Eropa. Kerjasama ini tidak hanya sebatas pertukaran teknologi dan sumber daya perikanan melainkan sama-sama menjaga keamanan laut disekitar kedua negara, menjaga ekosistem laut, dan penegakan hukum kelautan.
3	ASEAN Maritime Forum dalam Keamanan Maritim di Kawasan Asian Tenggara Danita Pravinska	Keamanan Internasional Metode Deskriptif	Pembentukan forum ASEAN Maritime Forum (AMF) dikarenakan permasalahan keamanan perairan seperti ilegal <i>fishing</i> , pembajakan kapal-kapal pengangkut barang, pembunuhan dll. Dengan adanya forum ini, agar negara-negara Asia Tenggara lebih memperhatikan keamanan lautnya agar tercipta kawasan yang damai dan aman, memperlancar kegiatan perekonomian, terjalinnya hubungan yang lebih erat antara negara-negara Asia Tenggara dan terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera dan mampu mengatasi berbagai isu dan permasalahan maritim di kawasan Asia Tenggara
4	Kerjasama Maritim Asia Tenggara Dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan	Kerjasama Multilateral Neo-Liberal, Teori Fungsional, Metode Deskriptif Analisis	Dengan adanya kegiatan ilegal <i>fishing</i> yang menjadi permasalahan di Asia Tenggara terbentuklah sebuah pertemuan yang menghasilkan sebuah perjanjian yaitu Responsible <i>Fishing</i> Practices Including Combating IUU <i>Fishing</i> In the Region. Walaupun pertemuan tersebut masih banyak kekurangan seperti salah satu anggota dari RAOP-IUU yaitu Thailand yaitu belum meratifikasi UNCLOS, lalu belum adanya negara yang memiliki cara penting dalam pengaturan perilaku negara-negara dalam konteks hukum laut Internasional dan permasalahan

	Republik Indonesia (WPPRI)Dewi Indira Biasane		antara negara-negara Asia Tenggara mengenai perbatasan wilayah kemaritiman yang menjadi hal yang paling sensitif pun sampai saat ini belum terselesaikan.
5	Kerjasama Indonesia – Australia dalam Penanganan Illegal Fishing Tya Gita Herdianan	Konsep Kepentingan Nasional dan Kerjasama Bilateral	Kerjasama yang dilakukan kedua negara tersebut terjalin akibat ancaman yang di peroleh dari para pelaku illegal fishing yang mengancam potensi ekonomi yang sangat tinggi yang dimiliki Indonesia dan Australia dan juga untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasional lainnya. Namun dalam kerjasama tersebut, Indonesia memberikan dua persyaratan kepada Australia yang berisi bahwa Australia tidak diperbolehkan memihak Kelompok Separatis Papua Barat dan menjadi pangkalan atau tempat utama bagi kelompok pro- kemerdekaan Papua. Dengan di setujui nya persyaratan tersebut oleh Australia, maka perjanjian Lombok resmi menjadi jalan keluar untuk penanganan kasus <i>illegal fishing</i>

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye adalah hubungan antar negara yang terbentuk oleh hubungan saling ketergantungan yang sangat rumit. Saat adanya tingkat ketergantungan yang tinggi maka negara-negara akan membentuk lembaga-lembaga internasional untuk menghadapi permasalahan yang ada secara bersama-sama. Dengan adanya lembaga-lembaga yang telah dibangun, kerjasamapun mampu melewati batas-batas internasional yang nantinya lembaga tersebut mampu memberikan informasi dan mengurangi biaya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Lembaga internasional bisa

berasal dari organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang non-formal untuk menghadapi kegiatan ataupun permasalahan secara bersama-sama.¹⁶

Maksud dari kerjasama internasional ini adalah suatu kegiatan atau interaksi antara negara-negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya baik di bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi dan sosial, yang mana manfaat dari kerjasama internasional ini tidak hanya dapat dirasakan oleh salah satu pihak saja, namun akan terjadinya timbal balik dari setiap pelaku yang melakukan kegiatan tersebut. Kerjasama Internasional terbentuk karena terdapatnya kehidupan internasional yang ada di berbagai macam bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, keamanan dan akhirnya memunculkan banyak kepentingan.¹⁷

Kerjasama internasional pun tidak hanya kerjasama antara negara saja, tetapi juga negara dengan organisasi internasional, dan organisasi internasional dengan organisasi internasional.¹⁸ Faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama internasional yaitu adanya kebutuhan suatu negara yang tidak didapat di dalam negaranya sendiri, baik itu dari segi sumber daya manusia, sumber daya alamnya, maupun kemampuan dalam mengelola sumber daya alam. Hal ini terjadi karena karakteristik setiap negara berbeda-beda. Tujuan dari kerjasama internasional ini

¹⁶ Robert Jackson dan George Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 63-64.

¹⁷ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2006, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 34.

¹⁸ Drs. T May Rudy, SH., MIR., M.Sc. , 2009, *Administrasi Organisasi Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 2

tidak hanya untuk mencapai kepentingan nasional, dan sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Akan tetapi kegiatan ini juga menciptakan persahabatan antara negara dengan negara, organisasi dan organisasi, ataupun organisasi dan negara, sehingga kemungkinan untuk terjadinya peperangan sangatlah kecil, karena satu sama lain saling ketergantungan.

1.5.2 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suatu kepentingan dengan cara melakukan sebuah kerjasama, baik itu kerjasama antara negara dengan negara, organisasi dengan organisasi ataupun negara dengan organisasi. Kepentingan nasional adalah kumpulan tujuan sebuah negara yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan dan cita-citanya untuk melindungi dan mempertahankan identitas negara, ekonomi, politik dan budaya dan lain sebagainya dengan cara melakukan semua kerjasama.¹⁹

Dalam kasus ini, Indonesia melakukan kerjasama Internasional dengan salah satu organisasi dibawah naungan PBB yaitu FAO untuk menanggulai permasalahan *IUU Fishing*. Indonesia sendiri memiliki kepentingan dalam bekerjasama dengan FAO, salah satunya kepentingan dalam ekonomi dan politik keamanan.

. Dalam bekerjasama dengan FAO, Kepentingan Indonesia di bidang ekonomi sendiri ialah meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, meningkatkan keamanan pangan dan

¹⁹ Sulis Endah Wulandari, "Hambatan Perdagangan Lintas Batas Antara Masyarakat Indonesia Dengan Masyarakat Timor Leste, Study Kasus Transaksi Perdagangan Lintas Batas di Pasar Motaain Nusa Tenggara Timur (NTT), eJurnal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, ISSN 0000.0000 hal. 4 (13 Juni 2017,12:00 WIB)

mata pencaharian masyarakat pesisir, dan *IUU fishing* merugikan Indonesia secara ekonomi yang mencapai Rp 300 triliun setiap tahun. Dalam membangun perekonomian sumber daya kelautan dan perikanan, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan FAO tersebut melalui *Transfer of Knowledge*. Transfer of Knowledge tersebut dilakukan melalui pertukaran tenaga ahli dan ilmu pengetahuan. Dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh FAO, Indonesia mampu memanfaatkan sumberdaya manusianya untuk mengelola sumber daya laut Indonesia agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, pemerintah Indonesia diharapkan mampu menyiapkan masyarakat, terutama para masyarakat pesisir untuk menghadapi sistem Blue Ekonomi.

Lalu Kepentingan Indonesia dalam kerjasamanya dengan FAO ialah dibidang politik keamanan, yang meliputi mencegah dan menanggulangi praktek *illegal fishing*, lalu Indonesia berupaya untuk memperkuat keabsahan hukum internasional atas wilayah kelautan Indonesia, dan menyelamatkan potensi kekayaan negara dari sektor kelautan dan perikanan karena Indonesia terancam krisis perikanan, ekosistem laut Indonesia terancam kehancuran dan mengembalikan citra positif Indonesia di mata internasional. Kemudian melindungi nelayan – nelayan skala kecil.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan model analisa data kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan sebuah permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan analisa data dan penilaiannya secara objektif. Menurut Sanapiah Faisal, penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksomonik yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan masalah dan unit yang diteliti.²⁰

1.6.2 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data induktif yaitu mengumpulkan data-data terkait kemudian melakukan deskripsi atas data dengan tujuan akhir membangun generalisasi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka yang bertujuan agar hasil dari penelitian ini lebih akurat dari sisi keilmuan. Metode ini dilaksanakan dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang ada di buku, artikel, di samping itu tentunya media massa baik cetak maupun elektronik juga akan dijadikan sebagai sumber data guna melengkapi kebutuhan bahan tulisan ini.

²⁰Sanapiah Faisal, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 107.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Waktu

Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dengan FAO sudah dimulai sejak tahun 2007, namun kerjasama tersebut ditingkatkan dengan dibentuknya MoU yang dilakukan KKP-FAO pada tanggal 27 Mei 2013. Untuk menghindari ketidakvalidan data, peneliti memfokuskan pada kerjasama KKP Indonesia dengan FAO pada tahun 2013 hingga tahun 2016, seperti kesepakatan pada MoU antara KKP-FAO

1.6.4.2 Batasan Materi

Dalam penelitian ini, untuk mencegah melebarnya pembahasan, maka peneliti memfokuskan pada kepentingan Indonesia dalam bekerjasama dengan *Food and Agriculture Organization* di bidang kelautan dan perikanan tahun 2013 - 2016.

1.7 Argumen Pokok

Untuk meningkatkan kerjasama, Indonesia - FAO menandatangani MoU pada tanggal 27 Mei 2013. Dalam MoU tersebut terdapat poin-poin penting yaitu meningkatkan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas termasuk juga mengenai pengembangan pendidikan, pelatihan untuk masyarakat nelayan, kemudian riset dan pertukaran para ahli, ilmuwan dibidang kelautan dan perikanan dan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak di atur (*IUU Fishing*). Kerjasama tersebut tidak hanya sebatas itu saja, akan tetapi kegiatan yang mengarah kepada pengembangan

kapasitas, kursus singkat dan pertukaran informasi di bidang kelautan dan perikanan. Tujuan MoU ini sendiri untuk mengantisipasi eksploitasi ikan berlebihan, dengan hasil tangkapan tersebut seharusnya mampu di manfaatkan sebaik mungkin. Bekerjasamanya Indonesia – FAO, memberikan peluang yang begitu besar kepada Indonesia untuk ikut dalam merancang berbagai kebijakan global di antaranya mengenai ketahanan pangan, kebutuhan nutrisi dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti beragumen bahwa dibalik kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia – FAO, Indonesia memiliki kepentingan terutama di bidang ekonomi yang meliputi peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, peningkatan keamanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir, pemberantasan *IUU fishing* yang merugikan Indonesia secara ekonomi. Kemudian kepentingan di bidang politik keamanan meliputi pencegahan dan penganggulan praktek *IUU fishing*, penguatan keabsahan hukum internasional atas wilayah kelautannya, penyelamatan potensi kekayaan negara dari sektor kelautan dan perikanan, serta pengembalian citra positif Indonesia di mata negara lain.

1.8 Sistematika Penulisan

Fokus utama dalam penulisan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kepentingan Indonesia dalam kerjasama dengan FAO di bidang kelautan dan perikanan. Penelitian ini terdiri dari empat bab yang pembahasannya akan

dikhususkan dalam setiap tema. Setiap tema terdiri dari beberapa sub-bab dengan tujuan untuk lebih mendetailkan pembahasan yang sedang dibicarakan. Sementara beberapa bagian dalam sub-bab akan menguraikan isi dari tiap bab secara lebih terperinci, sehingga dengan pemaparan yang sistematis akan menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Tabel 1.2 : Sistematika Penulisan

BAB	MATERI	ISI
BAB I	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Kerjasama Internasional 1.5.2 Kepentingan Nasional 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian 1.6.2 Teknik Analisa Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1 Batasan Waktu 1.6.4.2 Batasan Materi 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	Kerjasama Indonesia – <i>Food and Agriculture Organization</i> (FAO) di Bidang Kelautan dan Perikanan	2.1 Potensi Kekayaan Laut Indonesia 2.2 Sejarah dan Bentuk Kerjasama Indonesia – <i>Food and Agriculture Organization</i> (FAO) di Bidang Kelautan dan Perikanan 2.2.1 Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan 2.2.2 Peningkatan Kapasitas dan Juga Pengembangan Pendidikan, Pelatihan bagi Masyarakat Nelayan 2.2.3 Riset dan Pertukaran Para Ahli,

		<p>Ilmuan di Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>2.2.4 Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Perikanan yang Tidak Sah, Tidak di Laporkan dan Tidak di Atur (<i>IUU Fishing</i>)</p>
BAB III	<p>Kepentingan Indonesia Bekerjasama dengan <i>Food and Agriculture</i> (FAO) di Bidang Ekonomi</p>	<p>3.1 Transfer of Knowledge</p> <p>3.2 Kepentingan Indonesia di Bidang Ekonomi</p> <p>3.2.1 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Optimal dan Berkelanjutan</p> <p>3.2.2 Meningkatkan Keamanan Pangan dan Mata Pencarian Masyarakat Pesisir</p> <p>3.2.3 IUU Fishing Merugikan Indonesia Secara Ekonomi</p>
BAB IV	<p>Kepentingan Indonesia dengan <i>Food and Agriculture Organization</i> (FAO) di Bidang Politik Keamanan</p>	<p>4.1 Pencegahan dan Penanggulangan praktek <i>illegal, unreported and unregulated</i> (IUU) <i>fishing</i></p> <p>4.2 Indonesia Berupaya Memperkuat Keabsahan Hukum Internasional Atas Wilayah Kelautannya</p> <p>4.3 Menyelamatkan Potensi Kekayaan Negara dari Sektor Kelautan dan Perikanan</p> <p>4.4 Melindungi Nelayan Skala Kecil yang ada di Indonesia</p>
BAB V	PENUTUP	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>